

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Kebijakan

Pada tinjauan kebijakan ini akan menyajikan tentang ketentuan RTRW, Peraturan daerah dan RIPPDA Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dapat dilihat pada uraian berikut:

2.1.1 RTRW Kabupaten Bandung Barat

Dalam RTRW yang telah ditetapkan, pada pasal 67 tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diberikan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Kemudian pemanfaatan yang dilakukan atau kepemilikan oleh swasta dikenai pajak dan retribusi (pasal 68).

Pada pasal 76 tentang hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam tata ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. Mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinciannya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
- b. Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah;
- c. Mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangun terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten;
- d. Berperanserta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada 78 huruf b di atas, didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Dalam pemanfaatan ruang wilayah (pasal 80), setiap masyarakat wajib:

- a. Menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 82 tentang peranserta swasta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dalam pasal 76 yaitu:

- a. Penyusunan rencana tata ruang
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.2 RIPPDA Kabupaten Bandung Barat

Dalam RIPPDA Kabupaten Bandung Barat pada pasal 10 tentang kebijakan pembangunan kepariwisataan, dijelaskan bahwa:

- a) Pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b) Pengembangan agrowisata yang ditunjang oleh industri kecil di pedesaan;
- c) Pengembangan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri.
- d) Pengembangan program pariwisata Kabupaten Bandung Barat untuk mendukung pengembangan program pariwisata Provinsi Jawa Barat.
- e) Meningkatkan kesadaran para pihak tentang program pengembangan wisata alam;
- f) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- g) Memenuhi anggaran untuk pengembangan wisata alam;
- h) Mengembangkan kelembagaan pengelolaan wisata alam yang kuat dan berkesinambungan;
- i) Mengembangkan informasi dan publikasi mengenai daerah wisata di Kabupaten Bandung Barat.

Pada pasal 12 tentang strategi pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a) Peningkatan daya saing produk pariwisata;
- b) Peningkatan kemitraan usaha pariwisata; dan
- c) Pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Kemudian pada pasal 17 tentang pemberdayaan masyarakat pada program pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), kemudian pasal 18 penjelasan tentang pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi:

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar wisata;
- b) Tahap transformasi berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan dasar, sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan; dan
- c) Tahap peningkatan kemampuan keterampilan sehingga membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

Kemudian pada pasal 29 dijelaskan tentang kewajiban dari pihak swasta atau pengusaha pariwisata, yaitu meliputi:

- a) Membimbing masyarakat dalam pemanfaatan sarana lokal untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b) Memberikan donasi yang dapat mendorong pemeliharaan flora dan fauna serta spesies lainnya yang hampir punah;
- c) Mengembangkan tema-tema paket wisata ekowisata yang memelihara daya saing;
- d) Mendorong kode etik wisatawan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, menghormati adat istiadat setempat; dan
- e) Melakukan kegiatan promosi dengan berbagai kegiatan promosi dengan tetap melalui pendekatan pemasaran sosial.

Kemudian pada pasal 30 juga dijelaskan tentang kewajiban dan hak masyarakat dalam penataan ruang, yaitu:

- a) Berperanserta dalam proses perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang kawasan ekowisata;
- c) Reklamasi atau rehabilitasi lahan melalui inventarisasi lahan rusak, pemetaan lahan krisis dan penyusunan kajian terhadap lahan krisis;
- d) Memelihara lingkungan ekowisata berdasarkan kepada pembangunan pengetahuan ekowisata, memahami akan berbagai kendala dan pengaruh pembangunan ekowisata; dan

- e) Berperan dalam proses pembentukan regulasi di bidang lingkungan secara aktif untuk bersama-sama mempelajari secara teoritis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Peraturan Daerah Nomor 68 tahun 2010

Dalam peraturan daerah no 68 tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dijelaskan tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang. Pada pasal (6) Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, (7) Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, (8) Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang, (9) Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, (10) Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, (11) Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 2 menyebutkan bahwa masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang (pasal 4) adalah:

- a) Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
- c) Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
- d) Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Peran masyarakat dalam penataan ruang (pasal 5) dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang (Pasal 6) berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pada pasal 7 dijelaskan bahwa (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat, (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang (pasal 8) dapat berupa:

- a) Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b) Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c) Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d) Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f) Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (pasal 9) dapat berupa:

- a) Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b) Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c) Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d) Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

2.2 Teori Pariwisata

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan atau dari sebagian kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Sehubungan hal tersebut di atas, maka pengertian pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Berdasarkan pengertian ini maka pariwisata pada dasarnya mengandung lima unsur yaitu: unsur manusia (wisatawan), kegiatan (perjalanan/waktu), motivasi (menikmati), sasaran (objek dan daya tarik wisata) dan usaha (jasa pariwisata).

Kegiatan pariwisata dapat dipandang dari sisi penyediaan pariwisata yang akan menciptakan keberhasilan pengembangan kawasan tersebut. Komponen tersebut pada dasarnya meliputi:

1. Transportasi, jarak antara tempat tinggal dengan daerah tujuan wisata merupakan faktor yang sangat penting. Pengembangan pariwisata sangat tergantung pada kemudahan pencapaian daerah tujuan wisata (Gunn, 1979:222 dalam *Dampak Pengembangan Pariwisata Maninjau terhadap Perekonomian Masyarakat Setempat*, Youme, 1999:1).
2. Jasa Pelayanan (*services*), ketersediaan fasilitas pelayanan berkaitan dengan daya tarik suatu wilayah. Selain itu, aliran wisatawan yang

berkunjung ke suatu objek wisata sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pelayanan (Gunn, 1979:72 dalam *Dampak Pengembangan Pariwisata Maninjau terhadap Perekonomian Masyarakat Setempat*, Youme, 1999:1).

3. Komponen Daya Tank (*Attractions*), lingkungan fisik yang bervariasi merupakan atraksi yang akan menarik pelaku perjalanan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata tertentu (Gunn, 1979:71 dalam *Dampak Pengembangan Pariwisata Maninjau terhadap Perekonomian Masyarakat Setempat*, Youme, 1999:1).
4. *Informal dan Pwmosi*, seseorang dapat saja memiliki motivasi untuk melakukan perjalanan, tetapi mungkin ia tidak tahu cara melakukannya. Pengetahuan terhadap daerah tujuan wisata, ketersediaan fasilitas dan pelayanan tergantung pada ketersediaan informasi (Mathieson, 1982:312 dalam *Dampak Pengembangan Pariwisata Maninjau terhadap Perekonomian Masyarakat Setempat*, Youme, 1999:1).

Bagi suatu negara yang mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri di negaranya, maka lalu lintas orang-orang (wisatawan) tersebut ternyata memberikan keuntungan dan memberikan hasil yang bukan sedikit dan bahkan memberikan pendapatan (*income*) utama, melebihi ekspor bahan-bahan mentah, hasil tambang yang dihasilkan negara/daerah tersebut. Selain itu memberi dampak terhadap perekonomian di negara yang dikunjungi. Dampak yang dimaksud antara lain adalah:

1. Memberikan kesempatan kerja atau dapat memperkecil pengangguran.
2. Peningkatan penerimaan pajak dan redistribusi daerah.
3. Meningkatkan pendapatan nasional (*National Income*).
4. Memperkuat posisi neraca pembayaran (*Net Balance Payment*).
5. Memberikan efek multiplier dalam perekonomian setempat.

Jadi mengembangkan industri pariwisata pada suatu negara/daerah, tujuan utamanya adalah untuk menggali dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi sebagai akibat adanya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata di negara-daerah tersebut.

2.2.1 Jenis Pariwisata

Berbagai motivasi untuk melakukan suatu perjalanan wisata, hal ini akan berpengaruh pada daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi. Karena masing-masing daerah mempunyai potensi obyek wisata dan daya tarik wisata sendiri-sendiri, sehingga jenis pariwisata yang dikembangkan berdasarkan potensi yang ada. Berdasarkan jenisnya pariwisata dibedakan sebagai berikut (**J. Spillane**, 1987:28 dalam *Dampak Pengembangan Pariwisata Maninjau terhadap Perekonomian Masyarakat Setempat*, Youme, 1999:1).

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan sebaliknya untuk menikmati hiburan kota-kota besar.

b. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya. Biasanya mereka rekreasi ditepi pantai, pegunungan atau pusat-pusat perbelanjaan.

c. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup rakyat negara lain, untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau juga ikut serta dalam festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain.

d. Pariwisata untuk olah raga (*Sport Tourism*) Jenis ini dibagi dalam dua kategori :

1) *Big sport Evens*, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar, bertaraf internasional.

2) *Sporting Tourism of The Practitioners*, yaitu peristiwa olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti pendakian gunung, berburu, memancing dan lain-lain.

e. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Jenis ini merupakan bentuk perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.

f. Pariwisata untuk konvensi (*Convention Tourism*)

Konvensi atau penemuan bentuk ini sering dihadiri oleh ratusan dan ahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara. Adanya pertemuan-pertemuan di badan-badan atau organisasi-organisasi internasional.

Untuk di Kabupaten Bandung Barat sendiri memiliki jenis pariwisata dengan obyek dan daya tarik wisata berupa panorama dengan alam dan serta pegunungan, air terjun dan air panas, hutan dan taman wisata, peninggalan sejarah, budaya, agro dan karya.

2.2.2 Komponen Pengembangan Pariwisata

Dalam pengembangan pariwisata, pariwisata harus dilihat sebagai sistem keterkaitan antara komponen permintaan dan penyediaan. Komponen permintaan terdiri dari wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, sedangkan komponen kesediaan pariwisata terdiri dari aksesibilitas, obyek dan daya tarik wisata, fasilitas dan utilitas dan sikap penduduk terhadap pariwisata.

Pengembangan suatu daerah untuk kepentingan pariwisata akan memberikan dampak, baik yang positif maupun yang negatif, terhadap kondisi fisik serta kehidupan sosial ekonomi dan budaya penduduk setempat. Dampak sosial budaya wisata, meliputi perubahan sistem nilai, tingkah laku perorangan, hubungan keluarga, gaya hidup, moral, upacara tradisional dan organisasi kemasyarakatan. Dampak tersebut timbul sebagai akibat kontak antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah (**Pizam & Milman dalam Widodo, 1999:28**).

Sedangkan dampak pada kondisi fisik merupakan dampak yang ditimbulkan akibat dari kegiatan pariwisata terhadap elemen lingkungan fisik alami dan buatan manusia atau lingkungan fisik binaan (**Mathieson dan Wall, 1982:93 dalam Widodo, 1999 :28**).

Dari sisi ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah melalui pajak dan redistribusi, menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal dan sumber pendapatan utama maupun tambahan bagi

penduduk lokal, menarik investor dari luar. Pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran wisatawan tidak semuanya masuk ke daerah tersebut ada sebagian yang dibelanjakan di keluar, misalnya dalam bentuk pembelian barang-barang (makanan dan minuman impor untuk memenuhi kebutuhan wisatawan).

Selanjutnya jumlah pembelanjaan tersebut akan memberikan dampak berganda (*multiplier Effect*) terhadap berbagai komponen dalam usaha pariwisata. Besarnya angka penggandaan ini menjadi sangat penting serta menggambarkan besarnya tingkat pemerataan keuntungan ekonomis, yang dapat diterima oleh masyarakat lokal dari adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah/kawasan wisata. Di samping itu belanja wisatawan dapat pula merangsang pertumbuhan berganda pada sektor-sektor ekonomi lain. Industri hotel yang memerlukan daging, telur, sayuran, alat-alat dekorasi dan lain sebagainya. Hal ini merangsang tumbuhnya usaha-usaha perternakan, perkebunan, industri ringan dan lain-lain. Di samping itu wisatawan yang membeli barang seni sebagai cinderamata akan merangsang kegiatan kreasi seninya, sehingga seniman-seniman memerlukan bahan mentah tertentu untuk ungkapan kreasi seninya yang berupa kayu, cat kertas, amplas dan lain-lainnya. Para pengrajin terdorong pula untuk memproduksi barang-barangnya lebih banyak lagi. toko cinderamata tumbuh sebagai penyalur barang-barang kreasi seni maupun produksi pengerajin. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling merangkai dan saling menunjang.

Pengaruh langsung dampak ekonomi pada kawasan pariwisata adalah dari pengeluaran wisatawan. Wisatawan mengeluarkan uang untuk penggunaan makan, minum, belanja, pakaian, fotografi, pertunjukan dan souvenir. Keuntungan yang ditimbulkan dengan pembangunan pariwisata adalah dengan menyediakan lapangan kerja, menambah pendapatan, menambah pendapatan pemerintah (Mc Intosh, 1990:304, Gunn, 1998:244 *dalam Youme, 1999:22*).

Peran pariwisata sebagai sektor ekonomi yang sedang tumbuh akan menjadi sangat penting. Dikembangkannya suatu obyek wisata diharapkan akan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Namun demikian, di samping memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif. Dengan demikian, dalam perencanaan pengembangan pariwisata diperlukan upaya bagaimana untuk memaksimumkan dampak positifnya dan dapat mengantisipasi dampak negatif terhadap

perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan dampak ekonomi dari pariwisata di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata dapat menyumbang terhadap pembangunan wilayah melalui peran positif sebagai berikut:

1. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pemenuhan dari kebutuhan dasar penduduk setempat.
2. Ditingkat nasional melalui perolehan devisa, pariwisata mengurangi ketergantungan ekonomi dari luar.
3. Pariwisata mengurangi ketidakmerataan pendapatan antar wilayah. Pariwisata menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi masalah pengangguran.
4. Pariwisata mendorong sektor lain (muka dan belakang) seperti menaikkan produksi pertanian lokal, merangsang sektor industri dan bangunan.
5. Pariwisata meningkatkan prasarana dan sarana untuk penduduk setempat.
6. Pariwisata meningkatkan akses terhadap pusat pasar oleh jaringan jalan regional dan negara.

2.3 Tata Ruang

Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Land use* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2.3.1 Pengertian Tata Ruang

Definisi-definisi yang terkait dengan tata ruang:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (UU 26/2007 pasal 1).
2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak (UU 26/2007 pasal 1).

3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU 26/2007 pasal 1).
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang (UU 26/2007 pasal 1).
5. Rencana tata ruang adalah rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang di kemudian hari; rencana tersebut berdimensi tiga, dan berdimensi empat jika unsur waktu dipandang sebagai dimensi keempat; rencana tata ruang disebut berorientasi kepada kecenderungan karena memperhatikan kecenderungan perkembangan pada waktu yang lalu, masa kini dan waktu yang akan datang (Kamus Tata Ruang, 1998:91).
6. Tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggara kehidupan. Tata ruang pada hakikatnya merupakan lingkungan fisik yang mempunyai hubungan organisatoris/ fungsional antara berbagai macam objek dan manusia, yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu (Rapoport dalam Kartasasmita, 1996:427).

2.3.2 Perencanaan Tata Ruang

Tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Bentuk tata ruang pada dasarnya dapat berupa alokasi letak, luas, dan atribut lain (misalnya jenis dan intensitas kegiatan) yang direncanakan dapat dicapai pada akhir periode rencana. Selain bentuk tersebut, tata ruang juga dapat berupa suatu prosedur belaka (tanpa menunjuk alokasi letak, luas, dan atribut lain) yang harus dipenuhi oleh para pelaku pengguna ruang di wilayah rencana. Namun tata ruang dapat pula terdiri dari gabungan kedua bentuk di atas, yaitu terdapat alokasi ruang dan juga terdapat prosedur (Haeruman, 2004).

Di dalam tata ruang tercakup distribusi tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Konsep tata ruang menurut Foley dalam Kartasasmita (1996:427), tidak hanya menyangkut suatu wawasan yang disebut sebagai wawasan spasial, tetapi menyangkut pula aspek-aspek non spasial atau aspaspial. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat ditentukan dan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor non fisik seperti organisasi fungsional, pola sosial budaya, dan nilai kehidupan komunitas (Wheaton dan Porteous dalam Kartasasmita, 1996:427).

Pada kebanyakan perencanaan kota dan lingkungan, masyarakat acapkali dilihat sekadar sebagai konsumen yang pasif. Memang mereka diberi aktivitas untuk kehidupan, kerja, rekreasi, belanja dan bermukim, akan tetapi kurang diberi peluang untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dan perencanaannya (Budihardjo, 2005:8). Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan terhadap habitat dan lingkungannya. Rasa tersebut merupakan faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahankan atau melestarikan.

Pendekatan dengan partisipasi penduduk dalam perencanaan kota, memungkinkan keseimbangan antara kepentingan administrasi dari pemerintah setempat dan integrasi penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal (Jayadinata, 1986:201). Dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 2 macam partisipasi penduduk yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horisontal. Partisipasi vertikal adalah interaksi dengan cara dari bawah ke atas (*bottom up*), sedang partisipasi horisontal adalah interaksi penduduk dengan berbagai kelompok lain.

Langkah awal penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang. Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujudkan tata ruang yang memungkinkan semua kepentingan manusia dapat terpenuhi secara optimal. Rencana tata ruang, oleh sebab itu, merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan, bahkan merupakan persyaratan untuk dilaksanakannya pembangunan, baik bagi daerah-daerah yang sudah tinggi intensitas kegiatannya maupun bagi daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang.

Menurut Budihardjo dan Sujarto (2005:208), perencanaan tata ruang kota selama ini masih saja cenderung terlalu berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang, yang sering meleset akibat banyaknya ketidakpastian. Di sisi lain terdapat jenis-jenis perencanaan yang disusun dengan landasan pemikiran pemecahan masalah secara *ad hoc* yang berjangka pendek, kurang berwawasan luas. Seyogyanya pendekatan yang diambil mencakup keduanya. Selanjutnya dijelaskan beberapa usulan atau rekomendasi untuk peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang agar dapat berkelanjutan:

1. Agar pengelolaan dan tata ruang kota tidak lagi sekadar dilihat sebagai *management of growth* atau *management of changes* melainkan lebih sebagai *management of conflicts*.
2. Mekanisme *development control* yang ketat agar ditegakkan, lengkap dengan sanksi (dis-insentif) buat yang melanggar dan bonus (insentif) bagi mereka yang taat pada peraturan.
3. Penataan ruang kota secara total, menyeluruh dan terpadu dengan model-model *participatory planning* dan *over the board planning* atau perencanaan lintas sektoral sudah dilakukan secara konsekuen dan berkesinambungan.
4. Kepekaan sosio-kultural para penentu kebijakan dan profesional khususnya di bidang tata ruang kota dan lingkungan hidup seyogyanya lebih ditingkatkan melalui forum-forum baik secara formal maupun informal.
5. Dalam setiap perencanaan tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup agar lebih diperhatikan kekayaan khasanah lingkungan alam.
6. Peranserta penduduk dan kemitraan dengan pihak swasta agar lebih digalakkan.
7. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pada kepentingan rakyat agar dijabarkan dalam rencana dan tindakan nyata.

Perencanaan tata ruang dapat mempengaruhi proses pembangunan melalui 3 alat utama yaitu (Cadman dan Crowe, 1991:143):

1. Rencana pembangunan, yang menyediakan pengendalian keputusan melalui keputusan strategis di mana pemerintah mengadopsi rencana tata ruang untuk mengatur guna lahan dan perubahan lingkungan.
2. Kontrol pembangunan, yang menyediakan mekanisme administratif bagi perencana untuk mewujudkan rencana pembangunan setelah mengadopsi rencana tata ruang. Kontrol pembangunan ini berlaku pula bagi pemilik lahan, pengembang dan investor.
3. Promosi pembangunan, merupakan cara yang paling mudah mengetahui interaksiantara perencanaan tata ruang dengan proses pembangunan. Dalam konteks pemerintahan, maka dengan adanya rencana tata ruang, pemerintah menginginkan adanya pembangunan dan investasi di daerahnya dengan cara mempromosikan dan memasarkan lokasi, membuat lahan yang siap bangun dan menyediakan bantuan dana serta subsidi.

Pola pikir secara terpadu dalam penataan kota diperlukan, tidak saja dalam pengertian komprehensif terhadap unsur-unsur pembangunan kota namun juga mengandung pengertian terhadap pendekatan sistem yang tak terpisahkan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian (*development cycle*) dalam setiap tahap penataan kota. Artinya pada tahap perencanaan, harus berfikir tentang bagaimana mencapai rencana yang disusun (pemanfaatan), sekaligus bagaimana dapat konsisten terhadap rencana yang dirumuskan (pengendalian). Sebaliknya pada tahap pengendalian, harus melihat ijin pelaksanaan pembangunan (pemanfaatan) dan sekaligus mengacu pada rencana yang dibuat. Selain itu, rencana tata ruang hendaknya (Kiprah, 2001:22):

1. *Quickly yielding*, rencana tata ruang mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan daerah, menghasilkan langkah-langkah serta tahapan-tahapan dan waktu pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu tertentu.
2. *Political friendly*, demokratisasi dan transparansi sudah menjadi kebutuhan dalam seluruh rangkaian proses penyusunannya. Pengetahuan-pengetahuan rencana tata ruang mulai dari rembug desa hingga penetapan oleh DPRD sangat menentukan kewibawaan rencana tata ruang.
3. *User friendly*, mudah dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Sosialisasi perlu dilakukan terus menerus, sehingga masyarakat mudah memahami rencana dan perkembangan yang terjadi.
4. *Market friendly*, rencana tata ruang membuka peluang kepentingan dunia usaha dan rencana penanaman investasi dengan memperhatikan rencana tata guna tanah yang sesuai dengan peruntukannya.
5. *Legal friendly*, mempunyai kepastian hukum dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan-kemudahan untuk melakukan investasinya.

Lebih lanjut, suatu rencana tata ruang akan berhasil bila memenuhi kriteria/unsur-unsur sebagai berikut:

- c. Disusun berdasarkan orientasi pasar.
- d. Rencana tata ruang memiliki peluang bagi aktor atau *stakeholder* mengikuti dan mengisi tata ruang tersebut.
- e. Mempunyai batasan-batasan yang jelas terutama menyangkut kewenangan masing-masing aktor dan *stakeholder* agar mempunyai kepastian hukum yang jelas.
- f. Disusun untuk mengurangi dampak psikologis yang berkembang di dalam masyarakat dan mengakomodasikan berbagai kepentingan pelaku

- pembangunan, baik kelompok minoritas (misalnya pengembang, kontraktor) maupun mayoritas (masyarakat).
- g. Mempunyai informasi yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan pembangunan dan kapan rencana tersebut dilaksanakan.
 - h. Memiliki konsep pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi yang pasti, masyarakat mengetahui alokasi pembangunan dan pengembangan, sehingga diperoleh informasi daerah/kawasan yang dapat dikembangkan dan dipertahankan.
 - i. Disusun untuk membangun kebersamaan, memperoleh kesepakatan dengan menunjukkan pula kelemahan dan kelebihan rencana tata ruang serta dampak yang akan ditimbulkannya, baik positif maupun negatif.

Untuk meningkatkan kualitas tata ruang di setiap wilayah yang mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, maka diperlukan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kawasan-kawasan hijau. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan dititikberatkan pada hijau sebagai unsur kota, baik produktif maupun non produktif, dapat berupa kawasan jalur hijau pertamanan kota, kawasan hijau pertanian, kawasan jalur hijau pesisir pantai, kawasan jalur hijau sungai dan bentuk ruang terbuka hijau lainnya.

2.4 Peranserta Masyarakat

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umum, dikenal sebagai peranserta masyarakat. Yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, di mana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang berwenang (Canter, 1977). Secara sederhana Canter mendefinisikan sebagai *feed-forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).

2.4.1 Pengertian Peranserta

Terdapat banyak definisi mengenai peranserta di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa seseorang yang berperanserta sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan

atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya (Allport dalam Sastropetro, 1988:12).

2. Peranserta dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Davis dalam Sastropetro, 1988:13).
3. Peranserta masyarakat berarti menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu. Dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang dari pemerintah dan masyarakat dalam aktivitas tertentu (Ramos dan Roman dalam Yeung dan Mc.Gee, 1986:97).
4. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang (UU 26/2007).
5. Peranserta adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan (Soetrisno, 1995:207)
6. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai subyek dan obyek pembangunan; keterlibatan dalam tahap pembangunan ini dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya (Kamus Tata Ruang, 1998:79).
7. Menurut FAO dalam Mikkelsen (2003:64)
 - a. Peranserta adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
 - b. Peranserta adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
 - c. Peranserta adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
 - d. Peranserta adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.

- e. Peranserta adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- f. Peranserta adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud peranserta masyarakat dalam penataan ruang adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam suatu proses kegiatan penataan ruang, dimulai dari proses penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peranserta masyarakat adalah peranserta aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah:

- a. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
- c. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
- d. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;

- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

1. Masukan mengenai:
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. penetapan rencana tata ruang.
2. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Masyarakat adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Menteri. Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. Kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.

Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;

- b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
- c. Melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

2.4.2 Peranserta Swasta Dalam Penataan Ruang

Swasta merupakan salah satu pihak penting bagi terciptanya penataan ruang yang baik dan merupakan pelaku pembangunan penting dalam tata ruang, terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam tata ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat dan cukup memiliki perbedaan. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan. Dengan ini pihak swasta dapat membantu keterbatasan dari masyarakat maupun pemerintah, dengan cara merencanakan mengendalikan pembangunan lokasi usaha yang mereka bangun dan kelola agar dapat menjaga dan meningkatkan kualitas tata ruang sehingga dapat berkelanjutan.

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh swasta antara lain:

- 1) Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Memposisikan masyarakat umum sebagai pihak yang harus diperhatikan kepentingannya.
- 3) Mendukung proses perizinan yang melibatkan masyarakat.
- 4) Mendukung penyelenggaraan proses mediasi oleh pemerintah.
- 5) Memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan tata ruang.
- 6) Merencanakan, mendirikan dan mendukung pembangunan lokasi usaha yang sesuai dengan fungsi lahan dan tidak merubah fungsi ruang terbuka hijau.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peranserta swasta dalam tata ruang antara lain:

1) Manfaat kegiatan tata ruang yang dilakukan.

Jika kegiatan tata ruang yang dilakukan memberikan manfaat yang nyata dan jelas bagi masyarakat maka kesediaan swasta untuk berperanserta menjadi lebih besar.

2) Adanya kesempatan.

Kesediaan juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau ajakan untuk berperanserta dan swasta melihat memang ada hal-hal yang berguna dalam kegiatan tata ruang yang akan dilakukan.

3) Memiliki keterampilan.

Jika kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan keterampilan tertentu dan orang yang mempunyai keterampilan sesuai dengan keterampilan tersebut maka orang tertarik untuk berperanserta.

4) Rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tata ruang.

Rasa memiliki dan tanggung jawab sesuatu akan tumbuh jika sejak awal pada kegiatan tata ruang pihak swasta sudah diikut sertakan, jika rasa memiliki dan tanggung jawab ini bisa ditumbuh kembangkan dengan baik maka peranserta akan dapat dilestarikan dan ditularkan.

2.5 Teori Analisis

Pada teori analisis ini menjelaskan tentang metode analisis yang digunakan untuk mendukung dan memvalidasi hasil dari penelitian ini. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

2.5.1 Analisis Kolerasi

Apa sebenarnya korelasi itu? Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi/hubungan (*measures of association*). Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu Korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Spearman. Pengukuran asosiasi mengenakan nilai numerik untuk mengetahui tingkatan asosiasi atau kekuatan hubungan antara variabel. Dua variabel dikatakan

berasosiasi jika perilaku variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel tersebut disebut independen.

Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel (kadang lebih dari dua variabel) dengan skala-skala tertentu, misalnya Pearson data harus berskala interval atau rasio; Spearman dan Kendal menggunakan skala ordinal. Kuat lemah hubungan diukur menggunakan jarak (range) 0 sampai dengan 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah (*two tailed*). Korelasi searah jika nilai koefisien korelasi ditemukan positif; sebaliknya jika nilai koefisien korelasi negatif, korelasi disebut tidak searah. Yang dimaksud dengan koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariansi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefisien korelasi ditemukan tidak sama dengan nol (0), maka terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Jika koefisien korelasi ditemukan +1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan (slope) positif. Sebaliknya, jika koefisien korelasi ditemukan -1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan (slope) negatif. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis mengenai signifikansi antar variabel yang dikorelasikan, karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya variabel X mempunyai hubungan sangat kuat dengan variabel Y. Jika korelasi sama dengan nol (0), maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut.

2.5.1.2 Kegunaan Korelasi

Pengukuran asosiasi berguna untuk mengukur kekuatan (*strength*) dan arah hubungan antar dua variabel atau lebih. Contoh: mengukur hubungan antara variabel: 1) Motivasi kerja dengan produktivitas; 2) Kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan; 3) Tingkat inflasi dengan IHSG. Pengukuran ini hubungan antara dua variabel untuk masing-masing kasus akan menghasilkan keputusan, di antaranya: a) Hubungan kedua variabel tidak ada; b) Hubungan kedua variabel lemah; c) Hubungan kedua variabel cukup kuat; d) Hubungan kedua variabel kuat; dan e) Hubungan kedua variabel sangat kuat. Penentuan tersebut didasarkan pada kriteria yang menyebutkan jika hubungan mendekati 1, maka hubungan semakin kuat; sebaliknya jika hubungan mendekati 0, maka hubungan semakin lemah.

2.5.1.3 Konsep Linieritas dan Korelasi

Terdapat hubungan erat antara pengertian korelasi dan linieritas. Korelasi Pearson, misalnya, menunjukkan adanya kekuatan hubungan linier dalam dua variabel. Sekalipun demikian jika asumsi normalitas salah maka nilai korelasi tidak akan memadai untuk membuktikan adanya hubungan linieritas. Linieritas artinya asumsi adanya hubungan dalam bentuk garis lurus antara variabel. Linearitas antara dua variabel dapat dinilai melalui observasi *scatterplots* bivariat. Jika kedua variabel berdistribusi normal dan berhubungan secara linier, maka *scatterplot* berbentuk oval; jika tidak berdistribusi normal *scatterplot* tidak berbentuk oval.

Dalam praktiknya kadang data yang digunakan akan menghasilkan korelasi tinggi tetapi hubungan tidak linier; atau sebaliknya korelasi rendah tetapi hubungan linier. Dengan demikian agar linieritas hubungan dipenuhi, maka data yang digunakan harus mempunyai distribusi normal. Dengan kata lain, koefisien korelasi hanya merupakan statistik ringkasan sehingga tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk memeriksa data secara individual.

2.5.1.4 Asumsi-asumsi dalam Korelasi

Asumsi-asumsi dasar korelasi di antaranya ialah: Kedua variabel bersifat independen satu dengan lainnya, artinya masing-masing variabel berdiri sendiri dan tidak tergantung satu dengan lainnya. Tidak ada istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Data untuk kedua variabel berdistribusi normal. Data yang mempunyai distribusi normal artinya data yang distribusinya simetris sempurna. Jika digunakan bahasa umum disebut berbentuk kurva bel.

2.5.1.5 Karakteristik Korelasi

Korelasi mempunyai karakteristik-karakteristik di antaranya:

- a. Kisaran korelasi: Kisaran (*range*) korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif.
- b. Korelasi sama dengan nol: Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel.
- c. Korelasi sama dengan satu: Korelasi sama dengan + 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna (membentuk garis lurus) positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y juga naik.
- d. Korelasi sama dengan minus satu: artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna (membentuk garis lurus) negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun dan berlaku sebaliknya.

2.5.1.6 Pengertian Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan (*strength*) hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan berlaku sebaliknya. Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut (Sarwono, 2006):

- a. 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel
- b. $>0-0,25$: Korelasi sangat lemah
- c. $>0,25-0,5$: Korelasi cukup
- d. $>0,5-0,75$: Korelasi kuat
- e. $>0,75-0,99$: Korelasi sangat kuat
- f. 1: Korelasi sempurna

2.5.1.7 Signifikansi / Probabilitas / Alpha

Apa sebenarnya signifikansi itu? Dalam bahasa Inggris umum, kata, "*significant*" mempunyai makna penting; sedang dalam pengertian statistik kata tersebut mempunyai makna "benar" tidak didasarkan secara kebetulan. Hasil riset dapat benar tapi tidak penting. Signifikansi/probabilitas/ α memberikan gambaran mengenai bagaimana hasil riset itu mempunyai kesempatan untuk benar. Jika kita memilih signifikansi sebesar 0,01, maka artinya kita menentukan hasil riset nanti mempunyai kesempatan untuk benar sebesar 99% dan untuk salah sebesar 1%. 99% itu disebut tingkat kepentingan (*confidence interval*); sedang 1% disebut toleransi kesalahan.

Secara umum kita menggunakan angka signifikansi sebesar 0,01; 0,05 dan 0,1. Pertimbangan penggunaan angka tersebut didasarkan pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) yang diinginkan oleh peneliti. Angka signifikansi sebesar 0,01 mempunyai pengertian bahwa tingkat kepercayaan atau bahasa umumnya keinginan kita untuk memperoleh kebenaran dalam riset kita adalah sebesar 99%. Jika angka signifikansi sebesar 0,05, maka tingkat kepercayaan adalah sebesar 95%. Jika angka signifikansi sebesar 0,1, maka tingkat kepercayaan adalah sebesar 90%.

Pertimbangan lain ialah menyangkut jumlah data (sampel) yang akan digunakan dalam riset. Semakin kecil angka signifikansi, maka ukuran sampel akan semakin besar. Sebaliknya semakin besar angka signifikansi, maka ukuran sampel akan semakin kecil. Untuk memperoleh angka signifikansi yang baik, biasanya diperlukan ukuran sampel yang besar. Untuk pengujian dalam IBM SPSS digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika angka signifikansi hasil riset $< 0,05$, maka hubungan kedua variabel signifikan.
- b. Jika angka signifikansi hasil riset $> 0,05$, maka hubungan kedua variabel tidak signifikan.

2.5.1.8 Membuat Interpretasi Dalam Korelasi

Ada tiga penafsiran hasil analisis korelasi, meliputi: pertama, melihat kekuatan hubungan dua variabel; kedua, melihat signifikansi hubungan; dan ketiga, melihat arah hubungan. Untuk melakukan interpretasi kekuatan hubungan antara dua variabel dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi hasil perhitungan dengan menggunakan kriteria sbb: a) Jika angka koefisien korelasi menunjukkan 0, maka kedua variabel tidak mempunyai hubungan; b) Jika angka koefisien korelasi mendekati 1, maka kedua variabel mempunyai hubungan semakin kuat; c) Jika angka koefisien korelasi mendekati 0, maka kedua variabel mempunyai hubungan semakin lemah; d) Jika angka koefisien korelasi sama dengan 1, maka kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna positif; e) Jika angka koefisien korelasi sama dengan -1, maka kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna negatif.

Interpretasi berikutnya melihat signifikansi hubungan dua variabel dengan didasarkan pada angka signifikansi yang dihasilkan dari penghitungan dengan ketentuan sebagaimana sudah dibahas di atas. Interpretasi ini akan membuktikan apakah hubungan kedua variabel tersebut signifikan atau tidak. Interpretasi ketiga melihat arah korelasi. Dalam korelasi ada dua arah korelasi, yaitu searah dan tidak searah. Pada IBM SPSS hal ini ditandai dengan pesan *two tailed*. Arah korelasi dilihat dari angka koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel searah. Searah artinya jika variabel X nilainya tinggi, maka variabel Y juga tinggi. Jika koefisien korelasi negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah. Tidak searah artinya jika variabel X nilainya tinggi, maka variabel Y akan rendah.

Dalam kasus, misalnya hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas sebesar 0,86 dengan angka signifikansi sebesar 0 akan mempunyai makna bahwa hubungan antara variabel kepuasan pelanggan dan loyalitas sangat kuat, signifikan dan searah. Sebaliknya dalam kasus hubungan antara variabel harga dengan minat beli sebesar -0,86, dengan angka signifikansi sebesar 0; maka hubungan kedua variabel sangat kuat, signifikan dan tidak searah.

2.5.1.9 Korelasi Pearson

Korelasi Pearson Product Moment, yang merupakan pengukuran parametrik, akan menghasilkan koefisien korelasi yang berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan linier antara dua variabel. Jika hubungan dua variabel tidak linier, maka koefisien korelasi Pearson tersebut tidak mencerminkan kekuatan hubungan dua variabel yang sedang diteliti; meski kedua variabel mempunyai hubungan kuat. Simbol untuk korelasi Pearson adalah " ρ " jika diukur dalam populasi dan " r " jika diukur dalam sampel. Korelasi Pearson mempunyai jarak antara -1 sampai dengan + 1. Jika koefisien korelasi adalah -1, maka kedua variabel yang diteliti mempunyai hubungan linier sempurna negatif. Jika koefisien korelasi adalah +1, maka kedua variabel yang diteliti mempunyai hubungan linier sempurna positif. Jika koefisien korelasi menunjukkan angka 0, maka tidak terdapat hubungan antara dua variabel yang dikaji. Jika hubungan dua variabel linier sempurna, maka sebaran data tersebut akan membentuk garis lurus. Sekalipun demikian pada kenyataannya kita akan sulit menemukan data yang dapat membentuk garis linier sempurna.

Data yang digunakan dalam Korelasi Pearson sebaiknya memenuhi persyaratan, di antaranya ialah: a) Berskala interval/rasio, b) Variabel X dan Y harus bersifat independen satu dengan lainnya, c) Variabel harus kuantitatif simetris. Asumsi dalam Korelasi Pearson, di antaranya ialah: a) Terdapat hubungan linier antara X dan Y, b) Data berdistribusi normal, c) Variabel X dan Y simetris. Variabel X tidak berfungsi sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel tergantung, d) *Sampling representative*, c) Varian kedua variabel sama.

2.5.1.10 Prosedur Korelasi Pearson

Pada kasus ini kita akan melihat hubungan antara variabel jumlah kunjungan ke titik layanan penyelenggara telpon selular X dengan tingkat kepuasan. Untuk melihat hubungan tersebut kita membuat langkah-langkah seperti di bawah ini:

Pertama: siapkan data

No	Kunjungan	Kepuasan
1	47098	6754
2	56847	7925
3	36984	5687
4	87489	9483
5	23346	3514
6	38660	6642
7	41835	7411
8	60149	9935
9	25524	3543
10	55911	7634
11	47683	7603

Kedua: membuat desain variabelnya

Name	Type	Width	Decimal	Label	Values	Missing	Column	Align	Measure	Role
kunjungan	Numeric	8	0	Jumlah Kunjungan	None	None	8	R	Scale	input
kepuasan	Numeric	8	0	Tingkat Kepuasan	None	None	8	R	Scale	Input

Ketiga: memasukkan data mulai nomor 1 sampai 11 seperti di bawah ini

	kunjungan	Kepuasan
1		
.		
.		
11		

Keempat: melakukan prosedur analisis seperti di bawah ini:

- Analyze>Correlate>*Pilih sub menu *Bivariate*
- Pindahkan variabel kunjungan dan kepuasan ke kolom Variabel
- Correlation Coefficient*: pilih *Pearson*
- Test of Significance*: pilih *Two Tailed > Cek Flag significant correlation*
- Option: Missing Values*, pilihan: *Exclude cases pairwise*, tekan *Continue*
- Klik Ok

Setelah diproses, maka keluaran (output) hasil analisis sebagai berikut:

		Jumlah Kunjungan	Tingkat Kepuasan
Jumlah Kunjungan	Pearson Correlation	1	,881**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	11	11
Tingkat Kepuasan	Pearson Correlation	,881**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	11	11

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kelima: membuat interpretasi

Cara melakukan interpretasi sebagai berikut:

Pertama: Melihat kekuatan hubungan antara variabel produk dan penjualan. Angka didapatkan dengan membuat tabulasi silang antara Produk dan Penjualan seperti di bawah ini:

		Jumlah Kunjungan	Tingkat Kepuasan
Jumlah Kunjungan	Pearson Correlation	1	,881**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	11	11
Tingkat Kepuasan	Pearson Correlation	,881**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	11	11

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel di atas, terlihat angka koefisien korelasi Pearson sebesar .881**. Artinya besar korelasi antara variabel jumlah kunjungan dan tingkat kepuasan ialah sebesar 0,881 atau sangat kuat karena mendekati angka 1. Tanda dua bintang (**) artinya korelasi signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01 dan mempunyai kemungkinan dua arah (2-tailed). (Catatan: Jika tidak ada tanda dua bintang, maka secara otomatis signifikansinya sebesar 0,05)

Kedua: Melihat signifikansi hubungan kedua variabel. Angkanya ialah sebagai berikut:

		Jumlah Kunjungan	Tingkat Kepuasan
Jumlah Kunjungan	Pearson Correlation	1	,881**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	11	11
Tingkat Kepuasan	Pearson Correlation	,881**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	11	11

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Didasarkan pada kriteria yang ada Hubungan kedua variabel signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,001$. (Jika tidak ada tanda dua bintang, maka secara otomatis signifikansinya sebesar 0,05). Hubungan kedua variabel mempunyai dua arah (2-tailed), yaitu dapat searah dan tidak searah. Ketiga: Melihat arah korelasi antara dua variabel. Arah korelasi dilihat dari angka koefisien korelasi hasilnya positif atau negatif. Karena angka koefisien korelasi hasilnya positif, yaitu 0,881; maka korelasi kedua variabel bersifat searah. Maksudnya jika nilai jumlah kunjungan tinggi, maka nilai tingkat kepuasan akan tinggi pula. Kesimpulannya: Korelasi antara variabel jumlah kunjungan dan tingkat kepuasan sangat kuat, signifikan dan searah.

2.5.2 Analisis Cluster

Sama dengan analisis faktor, analisis *cluster* (*cluster analysis*) termasuk pada *Interdependes Techniques*. Namun ada perbedaan mendasar di antara kedua alat analisis multivariate ini. Jika analisis faktor (*R factor analysis*) bertujuan mereduksi variabel, analisis *cluster* (*Q factor analysis*) lebih bertujuan mengelompokkan isi variabel, walaupun bisa juga disertai dengan pengelompokan variabel. Dalam terminologi SPSS, analisis faktor adalah perlakuan terhadap kolom, sedangkan analisis *cluster* adalah perlakuan terhadap baris.

Tujuan utama analisis *cluster* adalah mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Objek bisa berupa produk (barang dan jasa), benda (tumbuhan atau lainnya), serta orang (responden, konsumen atau yang lain). Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih *cluster* (kelompok), sehingga objek-objek yang berada dalam satu *cluster* akan mempunyai kemiripan satu dengan yang lain.

Jadi definisi analisis *cluster*, analisis *cluster* adalah teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek/cases berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis *cluster* mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang memiliki sifat yang mirip (paling dekat kesamaannya) akan mengelompok ke dalam satu *cluster* (kelompok) yang sama.

Secara logika, *cluster* yang baik adalah *cluster* yang mempunyai:

- a. Homogenitas (kesamaan) yang tinggi antar anggota dalam satu *cluster* (*within-cluster*).
- b. Heterogenitas (perbedaan) yang tinggi antar *cluster* yang satu dengan *cluster* yang lainnya (*between-cluster*).

Beberapa manfaat dari analisis *cluster* adalah: eksplorasi data peubah ganda, reduksi data, stratifikasi sampling, prediksi keadaan obyek. Hasil dari analisis *cluster* dipengaruhi oleh: obyek yang diklasterkan, peubah yang diamati, ukuran kemiripan (jarak) yang dipakai, skala ukuran yang dipakai, serta metode pengklasteran yang digunakan.

2.5.2.1 Proses Analisis Cluster

Untuk menganalisis *cluster*, anda perlu melakukan proses sebagai berikut:

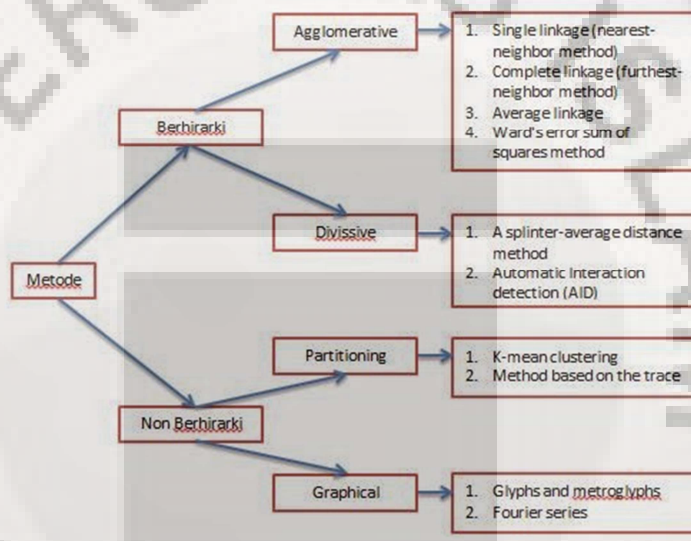
Tahap 1:

Mengukur kesamaan antar objek (*similarity*). Sesuai prinsip analisis *cluster* yang mengelompokkan objek yang mempunyai kemiripan, proses pertama adalah mengukur seberapa jauh ada kesamaan antar objek. Metode yang digunakan:

- Mengukur korelasi antar sepasang objek pada beberapa variabel
- Mengukur jarak (*distance*) antara dua objek. Pengukuran ada bermacam-macam, yang paling populer adalah metode *Euclidian distance*.

Tahap 2:

Membuat *cluster*. Metode dalam membuat *cluster* ada banyak sekali, seperti yang digambarkan dalam diagram di bawah ini:



Gambar 2.1
Diagram Analisis Cluster

1. Hirarchical Methode

Metode ini memulai pengelompokan dengan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga *cluster* akan membentuk semacam “pohon”, di mana ada hirarki (tingkatan) yang jelas antar objek, dari yang paling mirip sampai paling tidak mirip. Secara logika semua objek pada akhirnya akan membentuk sebuah *cluster*. Dendogram biasanya digunakan untuk membantu memperjelas proses hirarki tersebut.

Dalam metode hirarki *cluster* terdapat dua tipe dasar yaitu *agglomerative* (pemusatan) dan *divisive* (penyebaran). Dalam

metode *agglomerative*, setiap obyek atau observasi dianggap sebagai sebuah *cluster* tersendiri. Dalam tahap selanjutnya, dua *cluster* yang mempunyai kemiripan digabungkan menjadi sebuah *cluster* baru demikian seterusnya. Sebaliknya, dalam metode *divisive* kita beranjak dari sebuah *cluster* besar yang terdiri dari semua obyek atau observasi. Selanjutnya, obyek atau observasi yang paling tinggi nilai ketidakmiripannya kita pisahkan demikian seterusnya.

Dalam *agglomerative* ada lima metode yang cukup terkenal, yaitu: *Single Linkage*, *Complete Linkage*, *Average Linkage*, *Ward's Method*, *Centroid Method*.

- a. *Single Linkage*, prosedur ini didasarkan pada jarak terkecil. Jika dua obyek terpisah oleh jarak yang pendek maka kedua obyek tersebut akan digabung menjadi satu *cluster* dan demikian seterusnya.
- b. *Complete Linkage*, berlawanan dengan *Single Linkage* prosedur ini pengelompokkannya berdasarkan jarak terjauh.
- c. *Average Linkage*, prosedur ini hampir sama dengan *Single Linkage* maupun *Complete Linkage*, namun kriteria yang digunakan adalah rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu *cluster* dengan jarak seluruh individu dalam *cluster* yang lain.
- d. *Ward's Method*, jarak antara dua *cluster* dalam metode ini berdasarkan total *sum of square* dua *cluster* pada masing-masing variabel.
- e. *Centroid Method*, jarak antara dua *cluster* dalam metode ini berdasarkan jarak *centroid* dua *cluster* yang bersangkutan.

Keuntungan penggunaan metode hierarki dalam analisis *Cluster* adalah mempercepat pengolahan dan menghemat waktu karena data yang diinputkan akan membentuk hierarki atau membentuk tingkatan tersendiri, sehingga mempermudah dalam penafsiran, namun kelemahan dari metode ini adalah seringnya terdapat kesalahan pada data outlier, perbedaan ukuran jarak yang digunakan, dan terdapatnya variabel yang tidak relevan. Sedangkan metode non-hierarki memiliki keuntungan dapat melakukan analisis sampel dalam ukuran yang lebih besar dengan lebih efisien. Selain itu, hanya memiliki sedikit kelemahan pada data outlier, ukuran jarak yang digunakan, dan variabel tak relevan atau variabel yang tidak tepat. Sedangkan

kelemahannya adalah untuk titik bakal random lebih buruk dari pada metode hirarkhi.

2. *Non-Hierarchical Methode*

Berbeda dengan metode hirarki, metode ini justru dimulai dengan terlebih dahulu jumlah *cluster* yang diinginkan (dua *cluster*, tiga *cluster* atau yang lain). Setelah jumlah *cluster* diketahui, baru proses *cluster* dilakukan tanpa mengikuti proses hirarki. Metode ini biasa disebut dengan *K-Means Cluster*.

Kebalikan dari metode hirarki, metode nonhirarki tidak meliputi proses "*treelike construction*". Justru menempatkan objek-objek ke dalam *cluster* sekaligus sehingga terbentuk sejumlah *cluster* tertentu. Langkah pertama adalah memilih sebuah *cluster* sebagai inisial *cluster* pusat, dan semua objek dalam jarak tertentu ditempatkan pada *cluster* yang terbentuk. Kemudian memilih *cluster* selanjutnya dan penempatan dilanjutkan sampai semua objek ditempatkan. Objek-objek bisa ditempatkan lagi jika jaraknya lebih dekat pada *cluster* lain daripada *cluster* asalnya. Metode nonhirarki *cluster* berkaitan dengan *K-means clustering*, dan ada tiga pendekatan yang digunakan untuk menempatkan masing-masing observasi pada satu *cluster*.

- a. *Sequential Threshold*, Metode *Sequential Threshold* memulai dengan pemilihan satu *cluster* dan menempatkan semua objek yang berada pada jarak tertentu ke dalamnya. Jika semua objek yang berada pada jarak tertentu telah dimasukkan, kemudian *cluster* yang kedua dipilih dan menempatkan semua objek yang berjarak tertentu ke dalamnya. Kemudian *cluster* ketiga dipilih dan proses dilanjutkan seperti yang sebelumnya.
- b. *Parallel Threshold*, Metode *Parallel Threshold* merupakan kebalikan dari pendekatan yang pertama yaitu dengan memilih sejumlah *cluster* secara bersamaan dan menempatkan objek-objek kedalam *cluster* yang memiliki jarak antar muka terdekat. Pada saat proses berlangsung, jarak antar muka dapat ditentukan untuk memasukkan beberapa objek ke dalam *cluster-cluster*. Juga beberapa variasi pada metode ini, yaitu sisa objek-objek tidak dikelompokkan jika berada di luar jarak tertentu dari sejumlah *cluster*.

- c. *Optimization*, Metode ketiga adalah serupa dengan kedua metode sebelumnya kecuali bahwa metode ini memungkinkan untuk menempatkan kembali objek-objek ke dalam *cluster* yang lebih dekat.

Setelah *cluster* terbentuk, entah dengan metode hirarki atau non-hirarki, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap *cluster* yang terbentuk, yang pada intinya memberi nama spesifik untuk menggambarkan isi *cluster*. Misalnya, kelompok konsumen yang memperhatikan lingkungan sekitar sebelum membeli sebuah rumah bisa dinamai "*cluster* lingkungan".

Tahap 3:

Melakukan validasi dan profiling *cluster*. *Cluster* yang terbentuk kemudian diuji apakah hasil tersebut valid. Kemudian dilakukan proses profiling untuk menjelaskan karakteristik setiap *cluster* berdasarkan profil tertentu (seperti usia konsumen pembeli rumah, tingkat penghasilannya dan sebagainya). Analisis *cluster* agak bersifat subjektif dalam penentuan penyelesaian *cluster* yang optimal, sehingga peneliti seharusnya memberikan perhatian yang besar mengenai validasi dan jaminan tingkat signifikansi pada penyelesaian akhir dari *cluster*. Meskipun tidak ada metode untuk menjamin validitas dan tingkat signifikansi, beberapa pendekatan telah dikemukakan untuk memberikan dasar bagi perkiraan peneliti.

1. Validasi Hasil *Cluster*

Validasi termasuk usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menjamin bahwa hasil *cluster* adalah representatif terhadap populasi secara umum, dan dengan demikian dapat digeneralisasi untuk objek yang lain dan stabil untuk waktu tertentu. Pendekatan langsung dalam hal ini adalah dengan analisis sampel secara terpisah kemudian membandingkan antara hasil *cluster* dengan perkiraan masing-masing *cluster*. Pendekatan ini sering tidak praktis, karena adanya keterbatasan waktu dan biaya atau ketidakterediaan objek untuk perkalian analisis *cluster*. Dalam hal ini pendekatan yang biasa digunakan adalah dengan membagi sample menjadi dua kelompok. Masing-masing dianalisis *cluster* secara terpisah, kemudian hasilnya dibandingkan.

- a. *Profiling* Hasil *Cluster*

Tahap *Profiling* meliputi penggambaran karakteristik masing-masing *cluster* untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa berbeda secara relevan pada tiap dimensi. Tipe ini meliputi penggunaan analisis

diskriminan. Prosedur dimulai setelah *cluster* ditentukan. Peneliti menggunakan data yang sebelumnya tidak masuk dalam prosedur *cluster* untuk menggambarkan karakteristik masing-masing *cluster*. Meskipun secara teori tidak masuk akal (rasional) dalam perbedaan silang *cluster*, akan tetapi hal ini diperlukan untuk memprediksi validasi taksiran, sehingga minimal penting secara praktek.

Untuk melakukan proses analisis *cluster* ini, ada asumsi yang harus terpenuhi, yaitu: sampel yang diambil benar-benar dapat mewakili populasi yang ada (*representativeness of the sample*) dan Multikolinieritas. Sedangkan asumsi lainnya yang biasanya dilakukan pada analisis multivariat tidak perlu dilakukan, seperti: Uji Normalitas, Uji Linearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

2.5.3 Analisis Skalogram

Skalogram digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peranserta swasta pada objek wisata dalam peningkatan kualitas tata ruang, khususnya hirarki faktor-faktor yang mempengaruhi peranserta swasta. Analisis skalogram biasanya diberikan tambahan bobot untuk menghasilkan analisis yang lebih baik. Dengan beberapa tambahan analisis, misalnya aturan Marshall atau algoritma Reed-Muench, table skalogram menjadi indikasi awal analisis jangkauan setiap fungsi dan faktor-faktor yang dihasilkan.

Tahapan dalam analisis skalogram yaitu:

- a. Identifikasi semua variabel yang ada
- b. Perhitungan jumlah variabel dan pembobotan
- c. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peranserta swasta pada objek wisata berbasis lingkungan dan alam dalam peningkatan kualitas tata ruang.

Proses tabulasi dan pengurutan, sehingga keluar tabel hirarki pusat permukiman. Nilai atau tingkat kelayakan nilai pada analisis ini yaitu 0,9-1, tingkat kesalahan ini dapat dihitung dengan rumus. Pembobotan diberi angka untuk mempermudah menentukan hirarkinya, kemudian ditemukan faktor-faktor mana yang paling berpengaruh.

2.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam

penelitian yang memerlukan penjelasan. Definisi operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting. Definisi operasional tidak sama dengan tinjauan teoritis. Definisi operasional hanya berlaku pada area penelitian yang sedang dilakukan, sedangkan definisi teoritis diambil dari buku-buku literatur dan berlaku umum yang terkait penelitian, yaitu berupa definisi judul dan definisi lainnya. Seperti uraian berikut ini:

Pada dasarnya setiap penelitian harus mempunyai judul dan judul tersebut memiliki arti atau pengertian, sehingga apa yang tujuan penelitian tersebut terlihat secara jelas dan dapat dimengerti. Dalam hal ini akan dikemukakan contoh judul penelitian berikut arti atau pengertian masing-masing kata atau kalimat yang terkandung dalam judul tersebut. Berdasarkan judul dari penelitian ini adalah Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peranserta swasta pada objek wisata berbasis lingkungan dan alam dalam peningkatan kualitas tata ruang di Kabupaten Bandung Barat. Dari judul tersebut didapat poin-poin penting yaitu:

1. Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
2. Peranserta adalah ikut ambil bagian di suatu kegiatan; keikutsertaan secara aktif; partisipasi.
3. Swasta merupakan perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta. Istilah yang kurang ambigu untuk perusahaan swasta adalah perusahaan tak tersebut dan perusahaan tak terdaftar.
4. Objek wisata berbasis lingkungan dan alam adalah suatu industri pariwisata yang memperhatikan dan menjaga ekosistem, kelestarian serta keberlanjutan lingkungan dan alam sekitarnya.
5. Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu^[1]. Istilah ini banyak digunakan dalam dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, seperti Six Sigma, TQM, Kaizen, dll.

6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Definisi dari keseluruhan judul tersebut adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari apa saja dan mana saja faktor yang paling mempengaruhi bagi pihak investor atau swasta ingin ikut berperan serta dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tata ruang di Kabupaten Bandung Barat melalui pemanfaatan ruang dengan mengembangkan objek wisata berbasis lingkungan dan alam.

